



PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI PERINDO DPRD KABUPATEN NGADA TERHADAP PENGANTAR NOTA KEUANGAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2024

Yang terhormat,

Bapak pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ngada

Bapak Bupati dan Wakil Bupati Ngada

Bapak-bapak unsur FORKOMPIMDA Kabupaten Ngada

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bajawa

Bapak sekretaris Daerah Kabupaten Ngada

Para staf ahli Bupati Ngada

Para asisten Sekda Ngada

Para pimpinan perangkat daerah Kabupaten Ngada.

Rekan –rekan Wartawan

Singkatnya Segenap Hadirin Sidang Dewan yang kami hormati

Pada tempat pertama kita menghaturkan syukur yang tidak bertepi kepada Sang Khalik atas anugerahnya hingga saat ini masih memberikan nafas kehidupan kepada kita sehingga di momen istimewa ini, kami masih bisa berdiri di hadapan bapak ibu terhormat untuk menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Pengantar Nota Keuangan Atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024.

Pemandangan Umum yang dilaksanakan hari ini merupakan sebuah kemestian, hal penting serta mendasar dalam penyelenggaraan pemerintah sebagai sarana introspeksi dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan serta dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas tata keuangan daerah.

Pemandangan Umum Fraksi biasanya menampilkan banyak goresan dari setiap Fraksi yang pada akhirnya menjadi bentuk apresiasi sekaligus catatan untuk kita bersama sehingga pada waktu akan datang kita tidak terperosok pada kesalahan yang sama. Kita menerima adanya berbagai geseran dan pengurangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Pada Tahun 2024 yang telah berjalan yang sifatnya nasional karena situasi yang mendesak terutama adanya kebijakan-kebijakan baru yang harus diterapkan di negeri tercinta ini.

Kiranya banyak target yang telah dicapai dan juga kekurangan yang dihadapi harus merupakan hasil dari penggalian potensi daerah, aspirasi rakyat dan bermuara pada kepentingan bersama (*bonum commune*). Sehingga kita bersama-sama sepakat jika Pengantar Nota Keuangan Atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya dengan bersumber pada tiga kelompok pendapatan yakni pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Bapak Bupati Ngada serta seluruh hadirin yang kami hormati,

Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah dengan penyampaian Pengantar Nota Keuangan Atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Karena itu harus bertumpu pada regulasi-regulasi yang mengatur dengan tujuan untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Laporan pertanggungjawab pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan pemerintah kabupaten Ngada yang secara substansial memuat tujuh laporan yakni laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan equitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan catatan atas laporan keuangan wajib dan telah diaudit oleh BPK RI yang hasilnya menjadi dasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dibahas bersama DPRD.

Bapak Bupati Ngada serta seluruh hadirin yang kami hormati,

Setelah mencermati dan mempelajari Pengantar Nota Keuangan Atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024. Fraksi Partai Perindo memandang perlu untuk memberikan pandangan sebagai berikut:

1. Fraksi Perindo menyampaikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Ngada atas kerja kerasnya dalam pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2024 sehingga mendapat penilaian dari BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** setelah diaudit. Tujuan pemeriksa atas laporan keuangan adalah untuk memberikan pendapat atau opini atas laporan keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai Laporan Keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Opini WTP diberikan dengan kriteria sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan Laporan Keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP).

BPK sendiri dapat memberikan empat jenis opini yaitu **Wajar Tanpa Pengecualian** (WTP/*Unqualified Opinion*), **Wajar Dengan Pengecualian** (WDP/*Qualified Opinion*), **Tidak Memberikan Pendapat** (TMT/*Disclaimer Opinion*) dan **Tidak Wajar** (TW/*Adverse Opinion*). *Dan Kabupaten Ngada berada pada posisi opini tertinggi dalam penilaian BPK. Sekali lagi Apresiasi dan penghargaan yang tinggi untuk pencapaian ini.*

2. Dalam proses pengauditan yang dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024 hingga mendapat penilaian opini WTP harus dilihat sebagai sarana introspeksi dan evaluasi terhadap program. Dan tidak dipungkiri bahwa ada juga temuan yang harus segera ditindaklanjuti. Karena itu *Fraksi Meminta Pemerintah Kabupaten Ngada untuk menindaklanjuti hasil temuan dan rekomendasi BPK tersebut demi perbaikan pengelolaan pemerintah pada masa yang akan datang.* Fraksi Perindo juga memberikan masukan terkait dengan Realisasi APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

I. PENDAPATAN DAERAH

a. Pendapatan Asli Daerah

Fraksi Perindo memohon penjelasan pemerintah terkait dengan:

- Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan sebesar Rp. 50.519.508.005,00 terealisasi sebesar Rp. 45.701.023.657, 24 atau 90,46 % terjadi penurunan sebesar Rp. 4.818.484.347,76 atau 9,54% apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 yang realisasinya sebesar 99,60%.
- Realisasi Retribusi Daerah yang menurun dari target sebesar Rp. 10.422.268.005,00 terealisasi sebesar Rp. 4.848.848.432.58 atau 46,52%.

- Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dari target sebesar Rp. 2. 400.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.132.734.946,00 atau 47,93 %. Namun Fraksi Perindo memberikan apresiasi kepada Pemerintah terkait dengan :
 - Meningkatnya realisasi pajak daerah di mana target yang ditetapkan sebesar Rp. 10.297.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 10. 663.409.255,00 atau 103,55%.
 - Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah ditetapkan sebesar Rp. 27.399.740.000,00 terealisasi sebesar Rp. 29.056.033.023,66 atau 106,04%.
- b. Pendapatan Transfer
- Pendapatan Transfer ditetapkan sebesar Rp. 1.010.376.912.305,00 terealisasi sebesar Rp. 1. 008.016.183.534,00 atau 99,77 yang mengalami penurunan meskipun tidak signifikan dari target yang ditentukan. Mohon penjelasan Pemerintah terkait Pendapatan Transfer yang realisasi tidak sesuai dengan target yakni:
- Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dianggarkan sebesar Rp. 835.711.986.000,00 terealisasi sebesar Rp. 825.955.699.025,00 atau setara dengan 98,83%.
 - Pendapatan Transfer Pusat lainnya yang terdiri dari Pendapatan Dana Desa dan Dana Insentif Daerah dianggarkan sebesar Rp. 159.155.337.000,00 terealisasi sebesar Rp. 156.288.007.000,00 atau 98,20%.
 - Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah berupa pengembalian dana hibah KONI dan pendapatan dana kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) ditetapkan sebesar Rp. 7.478.456.652,00 terealisasi sebesar Rp. 7.329.530.367,27 atau 98,01%.
 - Di lain pihak Fraksi juga memberi apresiasi sekaligus meminta penjelasan Pemerintah terkait kenaikan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari provinsi ditetapkan sebesar Rp. 15.509.589.305,00 terealisasi sebesar Rp. 25.722.477.509,00 atau 166,17%.

II. BELANJA DAERAH DAN TRANSFER DAERAH

- a. Anggaran Belanja Daerah yang ditetapkan APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp. 1.102.334.439.498,00 dan direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp. 1.015.499.256.724,20 atau 92,12% apabila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan belanja sebesar 1,23 %. Mohon penjelasan Pemerintah terkait beberapa item belanja yang realisasinya tidak sesuai dengan target seperti pada:
- Belanja Pegawai realisasi sebesar Rp. 364.195.201.081,04 dari yang dianggarkan sebesar Rp. 390.891.201.179,00
 - Belanja Barang dan jasa realisasi Rp. 205.735.681. 132,5i dari yang dianggarkan sebesar Rp. 216.482.113.079,00
 - Belanja Bantuan Sosial realisasi sebesar Rp. 1.775.100.000,00 dari target yang ditentukan sebesar Rp. 2.030.000.000,00

b. Belanja Modal

Terealisasi sebesar Rp. 205.394.092.085,65 dari target yang dianggarkan sebesar Rp. 246.329.070.637,00. Terkait dengan belanja Modal Fraksi memohon penjelasan pemerintah terhadap item belanja yang realisasi tidak sesuai target seperti:

-Belanja modal peralatan dan mesin terealisasi sebesar Rp. 39.198.394.139,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 41.721.394.821,00.

-Belanja gedung terealisasi Rp.96.477.260.834,62 dari target sebesar Rp. 128.952.236.846,00.

-Belanja modal jalan, Jaringan dan irigasi realisasi sebesar Rp. 61.518.024.587,03 dari target sebesar Rp.64.894.341.512,00.

-Belanja modal asset tetap lainnya realisasi sebesar Rp.4.887.309.780,00 dari target Rp.6.868.020.350,00

-Belanja Modal asset lainnya realisasi sebesar Rp. 2.819.993.950,00 dari target sebesar Rp. 3.399.968.300,00

c. Belanja Tidak Terduga

Realisasi sebesar Rp. 3.489.734.000,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 6.581.781.972,00. Mohon penjelasan pemerintah terkait dengan realisasi yang tidak sesuai dengan target .

d. Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp. 202.276.083.242,00 dari target sebesar Rp. 207.386.916.448,00 . Fraksi memohon penjelasan terkait dengan dengan realisasi yang tidak sesuai dengan target antara lain:

-Belanja bagi hasil realisasi Rp. 658.216.937,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.111.486.800,00

-Belanja Bantuan keuangan. Realisasi sebesar Rp.201.617.866.305,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp. 206.275.429.648,00

III. PEMBIAYAAN

Jumlah realisasi pembiayaan Netto sebesar Rp. 34.199.246.656,15 dari yang dianggarkan sebesar Rp. 33.959.562.537,00 atau 100,71%. Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun ini sebesar Rp. 79.746.727.490,46.

Mencermati realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024 Fraksi Perindo berpendapat sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan pencapaian Pendapatan Daerah, Fraksi Perindo mengapresiasi usaha Pemerintah dalam mencapai target Pendapatan Daerah. Namun Fraksi melihat masih ada potensi Pendapatan yang belum dikelola secara maksimal seperti Art Center di tengah kota Bajawa yang sudah menghabiskan anggaran yang begitu besar dan Pariwisata Kebun raya Wolobobo. Fraksi mendukung Pemerintah untuk meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah termasuk optimalisasi pendapatan dari sector unggulan yang dimiliki

daerah ini. Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, perlu adanya peningkatan kreativitas program terpadu antar OPD sehingga percepatan dan pengoptimalan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah bisa tercapai dengan maksimal.

2. Berkaitan dengan efektivitas dan efesiensi belanja daerah Fraksi mencermati dalam dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Ngada Tahun 2024 tergambar realisasi Belanja yang cukup baik, namun masih terdapat beberapa program dan kegiatan yang tidak mencapai target realisasi anggaran yang telah ditetapkan. Fraksi berharap agar pemerintah lebih meningkatkan efektivitas dan efesiensi dalam penggunaan anggaran terutama dalam program-program yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Agar APBD yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan baik dan berdampak positif bagi masyarakat maka Fraksi Partai Perindo berharap agar Pemerintah terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pelaksanaan APBD, karena partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
4. Partai Perindo berpendapat bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun ini sebesar Rp. 79.746.727.490,46 masih terlalu tinggi yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara target yang ditetapkan dengan realisasi. Pemerintah daerah perlu mencermati hal ini untuk diperbaiki pada masa yang akan datang.

Bapak Bupati Ngada serta seluruh hadirin yang kami hormati,

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Ngada dalam menanggapi **PENGANTAR NOTA KEUANGAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPAT DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2024**. Dan akhirnya dengan kesadaran yang tinggi **“Fraksi Partai Perindo menyatakan menerima untuk dibahas dalam masa sidang ini,”**.

Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan merestui setiap upaya kita dalam menjalankan amanah rakyat.!

Bajawa, 11 Juli 2025

FRAKSI PARTAI PERINDO

1.	Helmut Waso	Ketua Fraksi	
2.	Syrilus Pati Wuli, S.Ag	Sekretaris	
3.	Thomas Djawa	Anggota	